

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia merupakan negara berkembang, dimana salah satu permasalahan negara berkembang berakar pada masalah-masalah yang kompleks, dan salah satunya masalah pembangunan. Pembangunan di negara berkembang seperti Negara Indonesia ini lebih ditekankan pada pembangunan ekonomi. Pembangunan ekonomi diputuskan sebagai langkah yang tepat dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Pembangunan ekonomi yang pesat di Indonesia dapat di lihat dari laju pertumbuhan ekonomi Indonesia. Laju pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2009 hingga 2013 mencapai rata-rata 5,9% per tahun yang merupakan pertumbuhan ekonomi tertinggi.¹

Dampak negatif dari pembangunan ekonomi akan menimbulkan beberapa hal, salah satunya adalah kesenjangan sosial. Kesenjangan sosial inilah yang akan melahirkan masyarakat miskin atau masyarakat pinggiran. Masyarakat miskin atau masyarakat pinggiran ini memiliki keterbatasan akses dalam menikmati pembangunan. Soetomo menyatakan bahwa:

“di tengah-tengah laju pertumbuhan ekonomi yang cukup mengesankan, masih banyak penduduk miskin dan tuna karya yang bukan saja tidak meningkat taraf hidupnya, bahkan tidak sedikit yang mengalami kemerosotan. Faktor-faktor yang diduga menjadi penyebab kondisi tersebut adalah kecilnya akses terhadap pasar dan sumberdaya, lemahnya kemampuan pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya manusia, struktur sosial yang tidak seimbang serta *urban bias* dalam proses pengambilan keputusan dan alokasi dana.”²

¹ http://www.bbc.co.uk/indonesia/berita_indonesia/2013/08/130816_rapbn_2014_sby.shtml
diakses tanggal 20 april 2014 pukul 12:33

² Soetomo. 2006. Strategi-Strategi Pembangunan Masyarakat. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Hal 5

Pembangunan yang di rancang untuk pembangunan nasional maupun pembangunan daerah menimbulkan dampak negatif bagi kehidupan sosial masyarakat. Pembangunan di Indonesia terus di tingkatkan dan di pusatkan pada kota-kota besar sehingga tidak mengherankan apabila terjadi peningkatan pula pada kemiskinan perkotaan di Indonesia.

Kemiskinan di perkotaan muncul sebagai permasalahan yang multidimensi. Bukan hanya sebagai akibat dari rendahnya pemenuhan kebutuhan tetapi sekaligus rendahnya akses terhadap fasilitas pembangunan, baik di sektor ekonomi, sosial, maupun politik. Bagong menjelaskan bahwa:

“Kemiskinan secara faktual tidak dapat di pandang sebagai sebab atau akibat saja, namun harus dipahami sebagai hubungan kausalitas yang membentuk apa yang disebut dengan “ lingkaran setan kemiskinan” hal ini terjadi akibat keterkaitan antara kemiskinan dengan pendapatan, pendidikan, konsumsi, kesehatan, produktivitas, investasi, tabungan dan produksi yang buruk.”³

Walaupun jumlah kemiskinan di desa lebih mendominasi tapi kemiskinan kota memiliki derajat kerentanan yang cukup tinggi, sehingga terjadi peningkatan pula penduduk miskin yang ada di kota. Peningkatan yang pesat tersebut dapat dikaitkan dengan ketiga penyebab pertumbuhan perkotaan yaitu ; perluasan kota menuju perbatasan perdesaan (30-40 persen), pertumbuhan alami (35-40 persen) dan perpindahan dari desa ke kota (25-30 persen).⁴

Mobilitas penduduk dari desa ke kota pada umumnya di latarbelakangi oleh kemiskinan. Langkah berpindah ke kota diputuskan sebagai tindakan untuk

³ Suyanto, Bagong dan Karnaji. 2005. Kemiskinan dan Kesenjangan Sosial: Ketika Pembangunan Tak Berpihak Kepada Rakyat Miskin. Surabaya: Airlangga University Press . Hal 163

⁴ World Bank Poverty Study, 2006 dalam catatan kebijakan Indonesia: Kemiskinan Perkotaan dan Ulasan Program yang di tulis oleh Judy L. Baker, lead economist, World Bank http://psflibrary.org/catalog/repository/Catatan%20Kebijakan_Kemiskinan%20Perkotaan%20dan%20Ulasan%20Program.pdf diakses tanggal 02 november 2013 pukul 20:10

memperbaiki taraf hidup. Pada prinsipnya urbanisasi dan kemiskinan tersebut merupakan permasalahan kronis yang sulit dipecahkan. Permasalahan tersebut sekaligus menyimpan berbagai masalah pembangunan antara lain ketimpangan sosial yang semakin luas di kawasan perkotaan. Ketimpangan sosial dan ketidakmampuan masyarakat urban dalam perubahan mekanisme perilaku ekonomi yang terjadi di kawasan perkotaan ini akan menambah jumlah kemiskinan kota.

Penduduk miskin di Indonesia pada tahun 2010 tercatat sekitar 13,3 persen dari penduduk miskin di Indonesia yaitu sekitar 31 023,40 jiwa. Penduduk miskin di Indonesia setiap tahunnya mengalami penurunan dari tahun 2010 hingga tahun 2012. Jumlah penduduk miskin ini terbagi di wilayah perkotaan dan wilayah pedesaan di seluruh Indonesia. Data penduduk miskin di Indonesia dapat di lihat dalam tabel berikut:

Tabel I.1
Jumlah dan persentase penduduk miskin di Indonesia.

Tahun	Jumlah penduduk miskin (000)			Persentase penduduk miskin (%)		
	Kota	Desa	Kota+desa	Kota	Desa	Kota+desa
2010	11 097,80	19 925,60	31 023,40	9,87	16,56	13,33
2011	11 046,75	18 972,18	30 018,93	9,23	15,72	12,49
2012	10 507,80	18 086,90	28 594,60	8,60	14,70	11,66

Sumber: Badan Pusat Statistik

Dari tabel diatas setiap tahun penduduk miskin di indonesia mengalami penurunan. Penurunan penduduk miskin setiap tahunnya sekitar 0,83 persen. Walaupun tidak tajam namun penurunan ini di harapkan bisa menjadi motivasi pemerintah untuk terus melakukan penanggulangan kemiskinan di Indonesia.

Pemerintah melakukan berbagai upaya dalam mengatasi masalah kemiskinan ini. Mulai dari mengubah orientasi pembangunan yang tidak hanya berpusat pada aspek ekonomi saja melainkan juga aspek sosial dan sumberdaya masyarakat. Sehingga pembangunan ini lebih di kenal dengan sebutan pembangunan masyarakat. Karena dengan adanya pembangunan masyarakat, di harapkan agar masyarakat miskin dapat secara aktif untuk ikut berpartisipasi dalam proses pembangunan sehingga mereka bisa terlepas dari belenggu kemiskinan. Masyarakat merupakan komponen penting dalam proses pembangunan.

Pembangunan masyarakat merupakan pembangunan yang secara keseluruhan melibatkan unsur masyarakat. Masyarakat bukan lagi hanya sebagai objek namun sekaligus sebagai subjek pembangunan. Masyarakat sebagai subjek dan objek pembangunan dapat di mendukung secara penuh terhadap pencapaian tujuan pembangunan. Seperti pernyataan Soetomo bahwa:

“faktor manusia memang merupakan potensi pembangunan sama halnya dengan faktor sumber alam, yang dapat digerakkan dan dapat dimanfaatkan untuk mencapai tujuan pembangunan.”⁵

Pemanfaatan masyarakat dalam pembangunan ini dapat di katakan sebagai pembangunan masyarakat. Pembangunan masyarakat merupakan pembangunan yang berorientasi pada masyarakat, dimana setiap proses melibatkan seluruh komponen masyarakat.

Pembangunan masyarakat memberikan penjelasan akan adanya upaya dalam meningkatkan kualitas sumberdaya manusia. Hal lain yang dapat dilihat dari pembangunan masyarakat adanya perubahan, perubahan tersebut yang nantinya

⁵ Opcit, Soetomo hal 12

dapat menjadikan setiap masyarakat yang terlibat dalam pembangunan menjadi sejahtera. Salah satu aspek yang hendak dicapai pada pembangunan masyarakat ini adalah peningkatan kapasitas. Soetomo menyatakan bahwa:

“Salah satu indikasi bahwa sudah ada pembangunan pada aspek masyarakat dan aspek manusia tersebut adalah adanya peningkatan kapasitas, termasuk kapasitas untuk membangun dirinya sendiri.”⁶

Pelibatan unsur masyarakat dalam setiap proses pembangunan menjadikan masyarakat lebih di akui harkat dan kapasitasnya. Menurut Soetomo:

“dengan harkat dan kapasitas manusia yang semakin memperoleh pengakuan, diharapkan pada tingkat masyarakat dapat didorong iklim yang semakin kondusif bagi warga masyarakat lapisan bawah untuk memanfaatkan peluang yang muncul, serta pada tingkat yang lebih makro dapat ditingkatkan posisi tawar masyarakat lokal terhadap masyarakat makronya dan juga terhadap negara.”⁷

Peningkatan kapasitas ini menjadi salah satu upaya pemerintah dalam pengentasan kemiskinan. Karena dengan peningkatan kapasitas pada masyarakat miskin, mereka bisa lebih terbuka terhadap peluang yang ada di sekitarnya. Peningkatan kapasitas ini diartikan sebagai peningkatan pengetahuan dalam setiap individu sehingga individu bisa mengembangkan potensi yang ada di dalam dirinya dan secara berkelanjutan sehingga dapat mensejahterakan kehidupannya.

Soetomo menjelaskan bahwa:

“pengembangan kapasitas masyarakat juga berarti mengembangkan kemampuan setiap individu warga masyarakat melalui peningkatan pengetahuan, skill, jiwa kewirausahaan dan penguasaan modal, sehingga di dalamnya terkandung dimensi ekonomi dan psikologis. Pada level masyarakat, peningkatan kapasitas dilakukan dalam bentuk pengembangan berbagai institusi sosial yang dapat mendukung meningkatnya kapasitas masyarakat untuk membangun secara lebih mandiri, terutama apabila aktualisasi

⁶ *Opcit*, Soetomo hal 23

⁷ *Opcit*, Soetomo hal 7

pengembangan kapasitas tadi dilakukan melalui berbagai bentuk aktivitas dan tindakan bersama.”⁸

Masyarakat miskin yang ada di Indonesia sebagian besar memiliki kapasitas yang rendah dalam dirinya. Salah satu bukti rendahnya kapasitas orang miskin di Indonesia adalah dengan keterbatasan kemampuan masyarakat miskin tersebut dalam pemenuhan kebutuhan. Mereka tidak mempunyai skill dan kemampuan yang besar dalam mengembangkan dirinya sehingga mereka tidak mampu memecahkan masalah yang menjerat diri mereka sendiri secara bertahun-tahun. Rendahnya kapasitas yang dimiliki oleh setiap individu menjadi salah satu hal yang menyebabkan mereka sulit untuk berkembang. Karena rendahnya pengetahuan dan pendidikan setiap orang miskin ini maka di perlukan adanya peningkatan kapasitas bagi setiap individu masyarakat miskin.

Pemerintah sebagai penyelenggara negara mempunyai kewajiban untuk mengatasi masalah kemiskinan tersebut dengan cara meningkatkan kapasitas diri masyarakat miskin. Dengan adanya upaya peningkatan kapasitas tersebut di harapkan masyarakat miskin mampu berpartisipasi aktif dalam setiap kebijakan yang di buat pemerintah sebagai bentuk penanggulangan kemiskinan. Dalam peningkatan kapasitas tersebut pemerintah telah membuatkan berbagai program. Program-program yang di rancang pemerintah untuk meningkatkan kapasitas tersebut menekankan pada bidang pemberdayaan. Pemberdayaan masyarakat merupakan strategi yang dianggap mampu untuk meningkatkan kapasitas seperti melalui program-program pelatihan untuk warga miskin, yaitu: pelatihan dalam bidang tata boga, maupun kerajinan tangan(*handycraft*). Pelatihan ini menjadi

⁸ *Opcit*, Soetomo hal 35

pengetahuan dan pengalaman baru bagi masyarakat miskin sehingga mampu mendorong masyarakat miskin untuk berfikir kreatif. Banyak program pemberdayaan untuk masyarakat miskin seperti Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri, Program Urban Farming, Program Pemberdayaan Perempuan, dll.

Salah satu program untuk menanggulangi kemiskinan dengan cara peningkatan kapasitas adalah Program Rehabilitasi Sosial Daerah Kumuh(RSDK). Program ini dilakukan di seluruh kota di Indonesia yang di khususkan pada kawasan permukiman kumuh yang ada di kota-kota besar salah satunya Kota Surabaya. Kota Surabaya merupakan kota metropolitan kedua setelah Kota Jakarta. Jumlah penduduk Kota Surabaya sekitar 2,7 juta jiwa pada tahun 2010 juga memiliki tingkat kemiskinan yang cukup tinggi. Besarnya jumlah penduduk miskin Kota Surabaya disebabkan oleh satu atau lebih faktor diantaranya yaitu: (1) miskin karena faktor ekonomi (2) miskin karena faktor kesehatan (3) miskin karena faktor tempat tinggal dan lingkungan (4) miskin karena faktor pendidikan (5) miskin karena faktor sosial.⁹

Upaya penanggulangan kemiskinan oleh pemerintah Kota Surabaya dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Program-program yang telah dicanangkan oleh pemerintah Kota Surabaya dapat dikelompokkan dalam berbagai bidang diantaranya adalah: (1) kelompok program bantuan sosial terpadu berbasis keluarga, (2) kelompok program berbasis pemberdayaan masyarakat, (3) kelompok program berbasis pada pemberdayaan

⁹ Dokumen Laporan pencapaian penanggulangan daerah (LP2KD) 2011

usaha ekonomi mikro dan kecil, (4) kelompok program berbasis koordinatif antar program.¹⁰ Hal ini dapat menjadi alat dalam menekan tingkat kemiskinan yang ada di Kota Surabaya. Sehingga tingkat kemiskinan Kota Surabaya sejak tahun 2003 sampai dengan tahun 2011 telah menunjukkan penurunan. hal ini seperti terdapat dalam tabel berikut:

Tabel I.2
Perkembangan Jumlah Penduduk Miskin dan Tingkat Kemiskinan Kota Surabaya Tahun 2003-2011

No	Tahun	Jumlah penduduk miskin (jiwa)	Tingkat kemiskinan (%)
1	2003	253.600	9,44
2	2004	248.200	9,21
3	2005	194.600	7,35
4	2006	210.800	8,08
5	2007	203.700	7,98
6	2008	209.900	8,23
7	2009	171.200	6,72
8	2010	195.484	7,07
9	2011	183.300	6,58

Sumber: Laporan pencapaian penanggulangan daerah (LP2KD) 2011

Menurut data BPS, Kota Surabaya merupakan salah satu Kota yang juga menyumbang pertumbuhan ekonomi terbesar di Provinsi Jawa Timur. Pada tahun 2010 pertumbuhan ekonomi Surabaya sebesar 5,11 persen, sedangkan pada tahun 2011 mengalami peningkatan menjadi 7,35 persen. Tak berhenti sampai di situ, sepanjang tahun 2012 Kota Pahlawan tercatat mampu membukukan angka pertumbuhan ekonomi hingga 7,64 persen.

Namun dalam kondisi pembangunan dan pertumbuhan ekonomi yang berkembang begitu pesat disisi lain ternyata masih banyak ketimpangan yang menyebabkan kondisi sosial masyarakat dengan penghasilan rendah belum bisa

¹⁰ Dokumen Laporan pencapaian penanggulangan daerah (LP2KD) 2011

menikmati adanya pembangunan kota. Belum sejahteranya sebagian masyarakat Kota Surabaya ini kemudian menjadi bukti bahwasannya tujuan negara yang ada dalam pembukaan UUD 1945 alenia ke empat yaitu memajukan kesejahteraan umum, belum sepenuhnya di rasakan sebagian kecil masyarakat di Indonesia terutama masyarakat miskin yang berada di Kota Surabaya.

Masih banyaknya masyarakat miskin di Kota Surabaya yang masih belum bisa menikmati kehidupan yang layak, dalam aspek “papan” misalnya sehingga mendorong sebagian dari mereka menggunakan lahan kosong sebagai tempat tinggal yang seharusnya tidak boleh seperti di area streen kali dan juga kolong jembatan. Bukan hanya di kedua area tersebut, banyak pula pemukiman padat penduduk di Kota Surabaya yang dianggap menjadi perkampungan kumuh karena sebagian besar kehidupan masyarakat miskin ini hidup secara berkelompok pada satu kawasan yang kemudian mereka tidak memelihara kondisi lingkungannya. Pembangunan yang tidak di imbangi dengan tata ruang kota dan keberpihakan terhadap masyarakat miskin inilah yang menyebabkan semakin meluasnya wilayah permukiman kumuh di Kota Surabaya.

Persebaran permukiman kumuh di Kota Surabaya hampir merata di seluruh wilayah. Bahkan di tengah kota yang merupakan pusat kegiatan ekonomi tidak menutup kemungkinan akan menimbulkan wilayah kumuh baru tengah kota. Menurut data Badan Perencanaan Pembangunan Kota Surabaya tahun 2008 di ketahui persebaran wilayah kumuh di kota surabaya sebagai berikut:

Tabel I.3

Lokasi Kawasan Kumuh di Kota Surabaya

Kecamatan	Kelurahan	Kecamatan	Kelurahan
Genteng	-	Sambikerep	Kel. Made
Bubutan	-	Lakarsantri	Kel. Lidah Kulon
Pabean Cantikan	Kel.Nyamplung	Sukomanunggal	-
Semampir	Kel. Ampel, kel. Sidotopo, kel. Ujung, kel wonokusumo, kel. Pegirian	Wonocolo	Kel. Bendul merisi, kel. Sidosermo, kel. Margorejo, kel. Jemur Wonosari, kel. Siwalan kerto
Krembangan	Kel. Dupak, kel. Kemayoran, kel. Moro Krembang	Wonokromo	Kel. Jagir, kel. Ngagel, kel. Darmo
Kenjeran	Kel. Tambak Wedi, kel. Tanahkali Kedinding, kel. Bulak Banteng	Simokerto	Kel. Sidodadi, kel. Tambak Rejo
Bulak	Kel. Sukolilo, kel. Kedung Cowek, kel. Kenjeran	Wiyung	Kel. Jajar Tunggal, kel. Wiyung, kel. Babadan
Tambaksari	Kel. Ploso, kel. Pacar kembang, kel. Gading, kel. Pacar keling	Pakal	Kel. Babat jerawat, kel. Benowo, kel. Tambak dono
Gubeng	Kel. Gubeng , kel. Mojo	Dukuh Pakis	Kel. Gunung sari
Rungkut	Kel. Wonorejo	Karangpilang	Kel. Karang pilang
Tenggilis Mejoyo	Kel. Panjang Jiwo	Gayungan	-
Gunung Anyar	Kel. Gunung Anyar Tambak, kel. Gunung Anyar	Tandes	Kel. Bibis, kel. Balongsari, kel. Tandes lor, kel. Gadel
Sukolilo	Kel. Nginden Jangkungan, kel. Gebang Putih, kel. Keputih, kel. Medokan Semampir	Benowo	Kel. Tambak oso wilangun, kel. Sememi
Tegalsari	Kel. Wonorejo, kel. Keputran, kel. Dr.	Jambangan	-

	Soetomo, kel. Kedungdoro		
Mulyorejo	Kel. Kalisari	Asemrowo	Kel. Greges, kel. Kalianak
Sawahan	Kel. Sawahan, kel. Banyu urip, kel. Putat jaya		
Jumlah keseluruhan	66 kelurahan		

Sumber : Bappeko Surabaya Tahun 2008 diolah

Hal ini pula menjadi fenomena menarik ketika dapat dilihat bagaimana perkembangan pertumbuhan ekonomi yang begitu pesat tidak di imbangi pula dengan kesejahteraan masyarakat. Tentu saja hal ini tidak sesuai dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang terdapat pada Pasal 28A “Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya” dan kemudian di perjelas dengan Pasal 28H ayat (1) Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan” sehingga jelas bahwasannya setiap warga negara berhak mendapatkan tempat tinggal yang layak. Diperlukan peran pemerintah yang aktif untuk melakukan perbaikan kondisi sosial maupun kondisi fisik lingkungan masyarakat miskin yang ada di pemukiman kumuh. Ketika kondisi lingkungan tempat tinggal yang tidak layak huni tersebut bisa teratasi dan menjadi lingkungan yang layak huni secara langsung cerminan yang ada di pasal 28H ayat 1 itu dapat di capai bahwasannya tiap orang berhak mendapatkan lingkungan yang baik.

Kawasan kumuh perkotaan menjadi perhatian tersendiri bagi Pemerintah Kota. Kawasan kumuh cenderung dengan kualitas sanitasi yang buruk sehingga

akan berdampak pula pada kesehatan masyarakat miskin. Menurut Patrick Mc.Auslan yang menyatakan bahwa:

“ada lima konsekuensi yang mesti ditanggung warga kota yang tinggal di wilayah permukiman kumuh atau permukiman liar, yakni: (1) orang terpaksa membangun rumah di tempat yang buruk dan berbahaya bagi kesehatan, (2) karena status mereka yang tidak legal dan tidak menentu itu, mereka hanya sedikit sekali menerima bantuan atau tanpa bantuan sama sekali dari pemerintah, (3) karena penghuni permukiman itu dalam keadaan tidak menentu karena mereka sendiri tidak tahu akan digusur atau tidak mereka tidak berani memperbaiki perumahan mereka, (4) kota itu sendiri menjadi berkembang secara serampangan dan (5) karena statusnya sebagai permukiman liar, perkampungan miskin itu lebih banyak mendapat tekanan dari petugas dan pengusaha serta penguasa setempat.”¹¹

Kawasan kumuh di Kota Surabaya bukan hanya di sekitaran bantaran kali saja melainkan juga di wilayah perkampungan warga padat penduduk yang kemudian menjadikan permukiman mereka menjadi kumuh lantaran mereka tidak mempunyai pengetahuan akan pentingnya hidup bersih dan bagaimana memiliki rumah yang nyaman sebagai tempat tinggal. Kurangnya pengetahuan tersebut menjadikan mereka hanya berfikir bagaimana memenuhi kebutuhan primer seperti pemenuhan kebutuhan makan sehingga mereka tidak lagi memikirkan kenyamanan tempat tinggal karena ketidakmampuan dan ketidakberdayaan mereka.

Program Rehabilitasi Sosial Daerah Kumuh(RSDK) merupakan program yang menekankan pembangunan sosial baik perbaikan secara fisik lingkungan, maupun kondisi sosial ekonomi masyarakat miskin. Program ini berdasar pada Peraturan Presiden Nomor 15 tahun 2010 tentang percepatan penanggulangan kemiskinan dan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 33 tahun 2011 tentang

¹¹ Opcit, Bagong hal 36

Pedoman Umum Pelaksanaan Program Rehabilitasi Sosial Daerah Kumuh Kota Surabaya. Rehabilitasi Sosial Daerah Kumuh (RSDK) yaitu suatu program yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas kehidupan sosial ekonomi masyarakat maupun keluarga miskin di kawasan pemukiman kumuh. Program ini merupakan pembangunan berbasis masyarakat (bottom up).

Program Rehabilitasi Sosial Daerah Kumuh (RSDK) ini di dalamnya dilakukan pelatihan keterampilan sebagai upaya untuk meningkatkan kapasitas masyarakat miskin. Masyarakat miskin yang awalnya tidak memiliki kemampuan untuk membuat kue atau pun *handycraft*, dengan adanya pelatihan yang di berikan ini di harapkan mampu untuk meningkat kemampuan masyarakat miskin tersebut sehingga mempunyai penghasilan tambahan ketika menggunakan keterampilan yang telah di dapat tersebut untuk memulai usaha.

Dalam program Rehabilitasi Sosial Daerah Kumuh (RSDK) ini di bentuk UPKM (Unit Pembinaan Keluarga Miskin). UPKM ini di bentuk dari warga tingkatan kelurahan. UPKM merupakan lembaga penguat dalam program pembangunan yang berbasis masyarakat yang merupakan sebagai wadah maupun penyalur partisipasi masyarakat pada permukiman kumuh. UPKM sebagai lembaga lokal juga mempunyai peran sebagai fasilitator dalam program RSDK.

Melalui program Rehabilitasi Sosial Daerah Kumuh (RSDK) ini, pemerintah bersama masyarakat melakukan perbaikan di seluruh kawasan permukiman kumuh dan juga melakukan pelatihan-pelatihan yang berguna untuk peningkatan kemampuan masyarakat miskin yang ada di Kota Surabaya. Pembentukan Kelompok Usaha Bersama juga dilakukan dalam program RSDK ini, yang

bertujuan untuk memberikan keterampilan kepada setiap masyarakat miskin sasaran program, yang harapannya keterampilan ini nantinya berguna untuk menambah penghasilan mereka.

Salah satu wilayah di Kota Surabaya yang mendapat program RSDK ini adalah Kelurahan plosok kecamatan Tambaksari Kota Surabaya. Lokasi ini di pilih karena beberapa hal, seperti : dapat diketahui bahwasannya Kelurahan Plosok merupakan salah satu kelurahan yang berada di Kecamatan Tambaksari dengan jumlah penduduk tertinggi di Kota Surabaya yaitu sekitar 241.237 jiwa. Kecamatan Tambaksari sejak tahun 2010 hingga tahun 2013 telah delapan kali tersentuh program Rehabilitasi Sosial Daerah Kumuh (RSDK) dengan Kelurahan Plosok dua kali berturut-turut tersentuh program ini. Berikut ini data wilayah pemukiman kumuh yang mendapat program RSDK selama pada tahun 2010 hingga 2013 adalah:

Tabel I.4
Wilayah yang mendapatkan program RSDK di Kota Surabaya
tahun 2010-2013

no	kecamatan	Kelurahan			
		2010	2011	2012	2013
1.	Pakal	Benowo	Babatjerawat	Tambak dono Sumber rejo	-
2.	Sawahan	Putat jaya Pakis	-	Kupang krajan Patemon	Pakis
3.	Sukomanunggal	Simomulyo	-	-	-
4.	Wiyung	Wiyung	Babatan	-	Balasklumprik
5.	wonokromo	Ngagel rejo ngagel	Sawunggaling	-	-
6.	Lakarsantri	Lakarsantri Jeruk	Sumurwelut Lakarsantri Lidah wetan	-	Jeruk Bangkingan
7.	Tandes	Manukan wetan Tubanan	-	Karangpoh	Manukan kulon
8.	Tambaksari	Pacarkembang Gading Pacarkeling	-	Plosok Kapasmadya baru	Plosok Rangkah

				Dukuh setro	
9.	karangpilang	Karangpilang Kedurus	Karangpilang	-	Kedurus
10.	Gubeng	pucangsewu	-	-	-
11.	Asemrowo	Asemrowo	-	Greges	-
12.	Gununganyar	Gununganyar	-	-	-
13.	Rungkut	Kedungbaruk	-	-	Wonorejo Penjaringan sari
14.	Benowo	-	Tambak oso wilangun Klakahrejo	-	Tambak oso wilangun
15.	Sambikerep	-	Sambikerep	-	Sambikerep Bringin Lontar
16.	Wonocolo	-	Bendul merisi	Siwalankerto margorejo	-
17.	Tegalsari	-	Keputran	-	Wonorejo
18.	Bubutan	-	Tembok dukuh Gundih Jepara	Bubutan	-
19.	Gubeng	-	Gubeng	Airlangga	-
20.	Mulyorejo	-	Kalijudan	Mulyorejo	-
21.	Semampir	-	Pegirian	-	Pegirian
22.	Kenjeran	-	Sidotopo wetan Tanah kali kedinding Tambak wedi	-	
23.	Dukuhpakis	-	-	Dukuh kupang	Pradakali kendal
24.	Krembangan	-	-	Dupak	-
25.	Genteng	-	-	Genteng Kapasari	Kapasari
26.	Simokerto	-	-	Simokerto Sidodadi	-
27.	Pabean cantian	-	-	-	Krembangan utara
28.	Tenggilis mejoyo	-	-	-	Tenggilis mejoyo
Jumlah		20	20	20	20
Total			80		

Sumber: Data Olahan

Dari fenomena-fenomena yang telah ada, penulis tertarik untuk meneliti tentang Peran Unit Pembina Keluarga Miskin (UPKM) dalam Meningkatkan Kapasitas Keterampilan Produksi Anggota Kelompok Usaha Bersama pada Program Rehabilitasi Sosial Daerah Kumuh (RSDK) di Kelurahan Ploso Kota Surabaya.

Hasil Penelitian yang dilakukan oleh Widya Putri Nugrahani dkk dengan judul Implementasi Program Rehabilitasi Sosial Daerah Kumuh Kota Surabaya yaitu 1) Implementasi Program Rehabilitasi Sosial Daerah Kumuh Kota Surabaya, yang meliputi tujuan dan sasaran program, komunikasi antar organisasi terkait dan kegiatan-kegiatan pelaksana, sumber dan alokasi dana, penyiapan kelembagaan/organisasi, pelaksanaan program di masyarakat. 2) Dampak yang timbul dari pelaksanaan Program Rehabilitasi Sosial Daerah Kumuh, yang meliputi dampak terhadap perubahan ekonomi, dampak terhadap perubahan fisik, dampak terhadap perubahan sosial. (3) Faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan Program Rehabilitasi Sosial Daerah Kumuh, yang meliputi faktor pendukung yaitu dana dan sarana dan prasarana, faktor penghambat, yaitu rendahnya tingkat partisipasi masyarakat, dan kurangnya pemahaman masyarakat akan pentingnya pengguliran dana.

Sedangkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Relia Hasnawati dengan judul peran lembaga pemberdayaan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat miskin (study deskriptif tentang peran badan keswadayaan masyarakat dalam meningkatkan partisipasi masyarakat miskin sasaran program nasional pemberdayaan masyarakat (PNPM) mandiri di Kelurahan Ngagel Rejo yaitu

ditemukan bahwa peran lembaga keswadayaan masyarakat dalam meningkatkan partisipasi masyarakat miskin adalah sebagai komunikator, motivator, pengawasan, memberikan pembinaan dan pengarahan melalui pendekatan-pendekatan informal agar lebih mengena pada masyarakat miskin.

Oleh karena itu penelitian ini dianggap penting karena akan di ketahui bagaimana Peran Unit Pembina Keluarga Miskin (UPKM) dalam meningkatkan kapasitas keterampilan produksi anggota kelompok usaha bersama pada Program Rehabilitasi Sosial Daerah Kumuh(RSDK).

1.2 Rumusan Masalah

Dari penjelasan latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

Bagaimana Peran Unit Pembina Keluarga Miskin (UPKM) dalam Meningkatkan Kapasitas Keterampilan Produksi Anggota Kelompok Usaha Bersama pada Program Rehabilitasi Sosial Daerah Kumuh(RSDK) ?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan bagaimana peran dari Unit Pembina Keluarga Miskin (UPKM) selaku lembaga yang dibentuk di masyarakat dalam meningkatkan kapasitas keterampilan produksi anggota kelompok usaha bersama pada program Rehabilitasi Sosial Daerah Kumuh (RSDK). Dari temuan penelitian ini nantinya dapat di jadikan sebagai rujukan bagaimana kapasitas pemberdayaan anggota kelompok usaha bersama pada program Rehabilitasi Sosial Daerah Kumuh(RSDK).

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat akademis maupun secara praktis.

1.4.1 Manfaat Akademis

Penelitian ini diharapkan bermanfaat dalam perkembangan riset Ilmu Administrasi Negara dalam bidang pemberdayaan masyarakat khususnya tentang peran Unit Pembina Keluarga miskin (UPKM) dalam meningkatkan kapasitas keterampilan produksi anggota kelompok usaha bersama pada program Rehabilitasi Sosial Daerah Kumuh (RSDK) sebagai salah satu program pemerintah dalam upaya penanggulangan kemiskinan. Disamping itu, dapat juga digunakan sebagai literatur untuk penelitian yang mengkaji bidang yang sama.

1.4.2 Manfaat Praktis

Penelitian ini di harapkan dapat menjadi masukan bagi UPKM dan pihak Dinas Sosial Kota Surabaya dalam pelaksanaan Program Rehabilitasi Sosial Daerah Kumuh secara lebih baik. Selain itu penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada Kelurahan Ploso Kota Surabaya sebagai salah satu kelurahan yang merupakan sasaran dari kegiatan program Rehabilitasi Sosial Daerah Kumuh(RSDK)

I.5 Kerangka Konseptual

I.5.1 Peran Unit Pembina Keluarga Miskin (UPKM)

Peran merupakan aspek penting dalam kehidupan masyarakat. Peran berarti sikap seseorang dalam mengambil suatu tindakan dalam masyarakat. Menurut Dwi Narwoko dan Bagong menganggap bahwasannya:

“ peran merupakan aspek yang dinamis dari kedudukan (status), peran sangat penting karena dapat mengatur perikelakuan seseorang, di samping itu peran menyebabkan seseorang dapat meramalkan perbuatan orang lain pada batas-batas tertentu, sehingga seseorang dapat menyesuaikan perilakunya sendiri dengan perilaku orang-orang sekelompoknya.¹²

Lebih lanjut Narwoko dan Bagong menjelaskan bahwa suatu peran paling sedikit mencakup 3 hal, yaitu¹³:

1. Peran meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat.
2. Peran adalah suatu konsep ikhwal apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat
3. Peran dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

Konsep peran memberikan kejelasan batasan pada individu dalam setiap tindakan masyarakat di lingkungannya. Menurut pandangan Gibson mengemukakan bahwa

“peran sebagai pola perilaku yang diharapkan diberikan pada posisi tertentu. Peran adalah apa yang harus dilakukan oleh seseorang untuk mengesahkan posisi khusus mereka.”¹⁴

¹² Narwoko, J. Dwi dan Bagong Suyanto. 2010. Sosiologi: Teks Pengantar dan Terapan (edisi ketiga). Jakarta: Kencana Prenada Media Group. Hal 158-159

¹³ *Ibid* hal 159

¹⁴ Gibson, James L. 1998. Organisasi dan Manajemen: Perilaku, Struktur Dan Proses. Jakarta: Erlangga. Hal 87

Menurut Suhardono menjelaskan bahwa

“peran merupakan seperangkat patokan yang membatasi apa perilaku yang mesti dilakukan oleh seseorang, yang menduduki suatu posisi tertentu.”¹⁵

Pendamping dalam sebuah program pemberdayaan merupakan sebuah lembaga lokal yang dibentuk yang bertujuan untuk mendampingi kelompok masyarakat dalam proses pemberdayaan. Pendamping memberikan fasilitas sebagai tempat untuk mencari akar permasalahan dan mencari solusi dari permasalahan tersebut.

Nadhir menjelaskan bahwa Pendamping adalah bagian dari komponen lembaga, instansi atau dunia usaha dalam proses pemberdayaan. Maka pendamping berkewajiban¹⁶:

1. Bertanggungjawab atas pelaksanaan seluruh kegiatan pemberdayaan.
2. Melakukan koordinasi dengan pihak terkait untuk memperlancar proses penguatan masyarakat lokasi program dan sekitarnya.
3. Menyusun konsep dan materi/bahan pembelajaran bersama masyarakat untuk kegiatan penguatan kapasitas, meliputi antara lain:

Penyusunan visi dan misi kegiatan

Pengembangan usaha / pelayanan

Pengelolaan keuangan yang akuntabel

Perencanaan dan evaluasi secara partisipatif

¹⁵ Suhardono, Edy. 1994. Teori Peran, Konsep, Derivasi dan Implikasinya. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. Hal 15

¹⁶ Nadhir, M. 2009. Memberdayakan Orang Miskin Melalui Kelompok Swadaya Masyarakat. Lamongan: Yapsem hal 3-4

Berdasarkan kewajiban dalam tugas tersebut, pendampingan mempunyai fungsi dan peran yaitu:

1. Fasilitator: seorang pendamping diharapkan dapat memobilisasi sumberdaya yang dimiliki oleh kelompok masyarakat serta sumberdaya disekitarnya, demi terciptanya situasi dan kondisi yang memungkinkan perkembangannya kegiatan.
2. Motivator: keberhasilan seorang pendamping banyak di tentukan oleh kemampuannya untuk memotivasi orang maupun kelompok untuk menggali potensi yang dimilikinya dan mengarahkan orang maupun kelompok tersebut untuk menggunakan potensi demi mencapai kesejahteraan bersama.
3. Penghubung: untuk menjebatani hubungan individu dengan kelompok, kelompok dan masyarakat. Maka seorang pendamping dituntut untuk dapat berperan aktif sebagai penghubung. Sehingga terjalin kerjasama yang saling menguntungkan antara pihak-pihak tersebut.

Dalam penelitian ini di gunakan teori peran sebagai fasilitator, peran sebagai motivator dan peran sebagai penghubung untuk melihat bagaimana UPKM yang telah di tugaskan sebagai lembaga lokal untuk pendampingan.

I.5.2 Pengembangan Kapasitas

Kapasitas dapat dimaknai sebagai kemampuan yang di miliki seseorang dalam melakukan sesuatu yang di inginkan. Menurut Milen menyatakan bahwa:

“kapasitas adalah kemampuan individu, organisasi atau sistem untuk menjalankan fungsi sebagaimana mestinya secara efisien, efektif dan terus-menerus.”¹⁷

¹⁷ Milen, A. 2006. Capacity Building; Meningkatkan Kinerja Sektor Publik. Yogyakarta: Pembaruan

Dalam pengertian tersebut menekankan bahwasannya setiap individu memiliki kemampuan untuk menjalankan fungsi sehingga tercapai tujuannya. Kapasitas ini pula di kembangkan secara terus menerus sehingga akan meningkatkan pengetahuan individu dalam berbagai hal. Menurut Morgan menjelaskan kapasitas adalah:

“ kapasitas sebagai kemampuan, keterampilan, pemahaman, sikap, nilai-nilai, hubungan, perilaku, motivasi, sumber daya, dan kondisi-kondisi yang memungkinkan setiap individu, organisasi, jaringan kerja/sector, dan sistem yang lebih luas untuk melaksanakan fungsi-fungsi mereka dan mencapai tujuan pembangunan yang telah ditetapkan dari waktu ke waktu.”¹⁸

Dari pendapat tersebut dapat di tarik kesimpulan bahwasannya kapasitas adalah kemampuan, sikap serta perilaku yang dimiliki setiap individu, atau organisasi untuk menjalankan fungsinya guna mencapai tujuan yang di inginkan.

Kapasitas yang dimiliki oleh setiap individu maupun organisasi perlu adanya kegiatan untuk mengembangkan kapasitas yang sudah ada tersebut. pengembangan berarti meningkatkan kapasitas sehingga kapasitas yang sudah ada tersebut dapat menjadi kinerja yang lebih baik lagi baik secara individu maupun organisasi.

Pengembangan kapasitas atau *Capacity Building* memiliki pengertian beragam menurut berbagai pendapat. Brown mendefinisikan pengembangan kapasitas adalah

“ *capacity building is a process that improves the ability of a person, group, organization, or system to meet its objectives or to perform better.*

¹⁸ Kamariah, Najmi dan Tim Peneliti STIA LAN Makassar. 2012. *Capacity Building Pemerintah Daerah Kabupaten atau Kota di Indonesia*. hal 7

(pengembangan kapasitas adalah proses yang meningkatkan kemampuan seseorang, kelompok, organisasi, atau sistem untuk memenuhi tujuan atau untuk melakukan lebih baik)¹⁹

Berdasarkan pendapatnya, pengembangan kapasitas merupakan suatu proses yang dapat meningkatkan kemampuan seseorang, organisasi atau sistem untuk mencapai tujuan yang hendak dicapai.

Capacity Building menurut Yeremias T. Keban menyatakan bahwa “Capacity Building” merupakan serangkaian strategi yang ditujukan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan responsivitas dari kinerja pemerintahan, dengan memusatkan perhatian kepada dimensi pengembangan sumberdaya manusia, penguatan organisasi, dan reformasi kelembagaan.²⁰

Capacity building dan capacity development mempunyai makna yang hampir sama. Bahwasanya istilah keduanya adalah pengembangan kapasitas yang berorientasi pada proses belajar baik di tingkat individu maupun organisasi.

Menurut Bolger menyatakan bahwa:

“Capacity Development is the process whereby people, organizations, and society as a whole unleash, strenghten, create, adapt, and maintain capacity over time.”

(Pengembangan Kapasitas adalah proses dimana orang-orang, organisasi, dan masyarakat secara keseluruhan pembelajaran, memperkuat, membuat, beradaptasi, dan memelihara kapasitas dari waktu ke waktu).²¹

Dari pengertian tersebut pengembangan kapasitas merupakan proses individu, kelompok maupun organisasi untuk meningkatkan kemampuan dan beradaptasi

¹⁹ Brown, Lissane. 2001. *Measuring Capacity Building*. Carolina Population Center. University Of North Carolina at Chapel Hill. Hal 11

²⁰ Yeremias T. Keban. 2000. “ Good Governance” and “capacity Building” Sebagai Indikator Utama dan Fokus Penilaian Kinerja Pemerintahan. Hal 7

²¹ Bolger, Joe. 2008. *Capacity Development in the Pacific: learning from success*. Mandaluyong City, phil : Asian Development Bank

serta memelihara kapasitas yang dimiliki tersebut secara terus menerus. Hal ini kemudian serupa dengan pendapat yang di kemukakan oleh Morrison:

“Capacity building can best be seen as a process to induce, or set in motion, multi-level change in individuals, groups, organisations and systems. Ideally, capacity building seeks to strengthen the self-adaptive capabilities of people and organisations, in order that they can respond to a changing environment, on an on-going basis. Capacity building is a process and not a product. In particular, capacity building is a multi-level learning process, which links ideas to action. Capacity building, in this view, can be defined as actionable learning.”

(Peningkatan kapasitas terbaik dapat dilihat sebagai proses untuk mendorong, atau menggerakkan, perubahan multi-level pada individu, kelompok, organisasi dan sistem. Idealnya, pembangunan kapasitas berusaha untuk memperkuat kemampuan self-adaptif orang dan organisasi, agar mereka dapat merespon perubahan lingkungan, secara terus-menerus. Pengembangan kapasitas adalah suatu proses dan bukan produk. Secara khusus, peningkatan kapasitas adalah proses pembelajaran multi-level, yang menghubungkan ide-ide untuk bertindak. Peningkatan kapasitas, dalam pandangan ini, dapat didefinisikan sebagai pembelajaran ditindak lanjuti)²².

Menurut pendapat tersebut bahwa pengembangan kapasitas merupakan sebuah proses bukan hasil. Peningkatan kapasitas merupakan proses untuk mendorong atau menggerakkan dari berbagai level yaitu individu, kelompok, organisasi dan sistem. Pengembangan kapasitas dianggap sebagai proses belajar secara terus menerus untuk memperkuat kemampuan individu ataupun organisasi sehingga dapat merespon perubahan.

Setiap masyarakat memerlukan adanya pengembangan kapasitas untuk meningkatkan kemampuan yang ada dalam dirinya. Terutama pada masyarakat miskin, pengembangan sangat perlu dilakukan dalam bentuk pemberian pelatihan yang berguna untuk meningkatkan pengetahuan ataupun keterampilan, sehingga

²² Morrison, Terrence. 2001. Actionable Learning: A Handbook for Capacity Building Through Case Based Learning, Asian Development Bank Institute. hal 4

mereka bisa secara sendirinya dapat mengembangkan kemampuan dan melepaskan diri dari masalah-masalah krusial yang ada dalam dirinya.

Soetomo menjelaskan bahwa:

“pengembangan kapasitas masyarakat juga berarti mengembangkan kemampuan setiap individu warga masyarakat melalui peningkatan pengetahuan, skill, jiwa kewirausahaan dan penguasaan modal, sehingga di dalamnya terkandung dimensi ekonomi dan psikologis. Pada level masyarakat, peningkatan kapasitas dilakukan dalam bentuk pengembangan berbagai institusi sosial yang dapat mendukung meningkatnya kapasitas masyarakat untuk membangun secara lebih mandiri, terutama apabila aktualisasi pengembangan kapasitas tadi dilakukan melalui berbagai bentuk aktivitas dan tindakan bersama.”²³

Dari penjelasan di atas mengenai pengembangan kapasitas, penulis menyimpulkan bahwasannya pengembangan kapasitas adalah suatu proses belajar secara terus menerus oleh individu untuk meningkatkan pengetahuan maupun keterampilan, yang kemudian berguna untuk menghadapi perubahan yang ada, baik perubahan yang berasal dari dalam lingkungan maupun perubahan yang berasal dari luar lingkungan.

1.5.2.1 Tingkatan Pengembangan Kapasitas

Peningkatan kapasitas merupakan unsur yang sangat penting dalam merespon setiap perubahan yang ada dalam masyarakat. Pengembangan kapasitas sangat perlu dilakukan dari berbagai level. Level terendah pengembangan kapasitas dilakukan pada individu. Pengembangan kapasitas individu dilakukan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan skill dalam diri individu tersebut sehingga dapat mengikuti setiap perubahan yang ada.

Grindle mengungkapkan bahwa:

²³ Soetomo. 2006. Strategi-Strategi Pembangunan Masyarakat. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Hal 35

“Capacity Building is the combination of strategy directed to improve efficiency, effectivity from the government performance, with attention focused on these dimensions:

1. *Development of the human resource*
2. *Strengthening organization, and*
3. *Reformation of institution.”*

(Kapasitas adalah kombinasi strategi diarahkan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas dari kinerja pemerintah, dengan perhatian terfokus pada dimensi ini:

4. *1 Pengembangan sumber daya manusia*
5. *2 Memperkuat organisasi, dan*
6. *3 Reformasi lembaga).²⁴*

Dari pendapat diatas dapat di ketahui tingkatan dari pengembangan kapasitas terdiri dari: (1) pengembangan sumber daya manusia (2) penguatan organisasi, (3) reformasi kelembagaan. Menurut A. Fiszbein peningkatan kemampuan difokuskan pada: (1) kemampuan tenaga kerja (labor), (2) kemampuan teknologi yang diwujudkan dalam bentuk organisasi atau kelembagaan; dan (3) kemampuan “capital” yang diwujudkan dalam bentuk dukungan sumberdaya, sarana, dan prasarana.²⁵ Sementara D. Eade merumuskan peningkatan kemampuan dalam tiga dimensi, yaitu: (1) individu (2) organisasi dan (3) network.²⁶

Pendapat lain yang di kemukakan oleh J.S.Edralin yang mengacu pada pendapat World Bank memfokuskan peningkatan kemampuan kepada: (1) pengembangan sumberdaya manusia, khususnya training, rekrutmen, pemanfaatan dan pemberhentian tenaga kerja profesional, manajerial dan teknis, (2) organisasi, yaitu pengaturan struktur, proses, sumberdaya, dan gaya manajemen, (3) jaringan kerja interaksi organisasi, yaitu koordinasi kegiatan kegiatan organisasi, fungsi jaringan kerja, dan interaksi formal dan informal, (4)

²⁴ Grindle M.S dalam Meidini, Refida Ayu. 2013. Capacity Building dalam Pelayanan Publik di Kantor Camat Taman Kabupaten Sidoarjo. Skripsi. Universitas Airlangga. Hal 26

²⁵ Opcit Yeremias hal 7-8

²⁶ Opcit Yeremias hal 8

lingkungan organisasi, yaitu aturan dan perundang-undangan yang mengatur pelayanan publik, tanggung jawab dan kekuasaan antara lembaga, kebijakan yang menghambat tugas-tugas pembangunan, dan dukungan keuangan dan anggaran; dan (5) lingkungan kegiatan yang luas, yaitu mencakup faktor politik, ekonomi, dan kondisi-kondisi yang berpengaruh terhadap kinerja.²⁷

Sementara itu, UNDP memfokuskan pada tiga dimensi yaitu: (1) tenaga kerja (dimensi sumberdaya manusia), yaitu kualitas SDM dan cara SDM dimanfaatkan, (2) modal (dimensi fisik) yaitu menyangkut peralatan, bahan-bahan yang diperlukan, dan gedung dan (3) teknologi yaitu organisasi dan gaya manajemen, fungsi perencanaan, pembuatan keputusan, pengendalian dan evaluasi, serta sistem informasi manajemen.²⁸

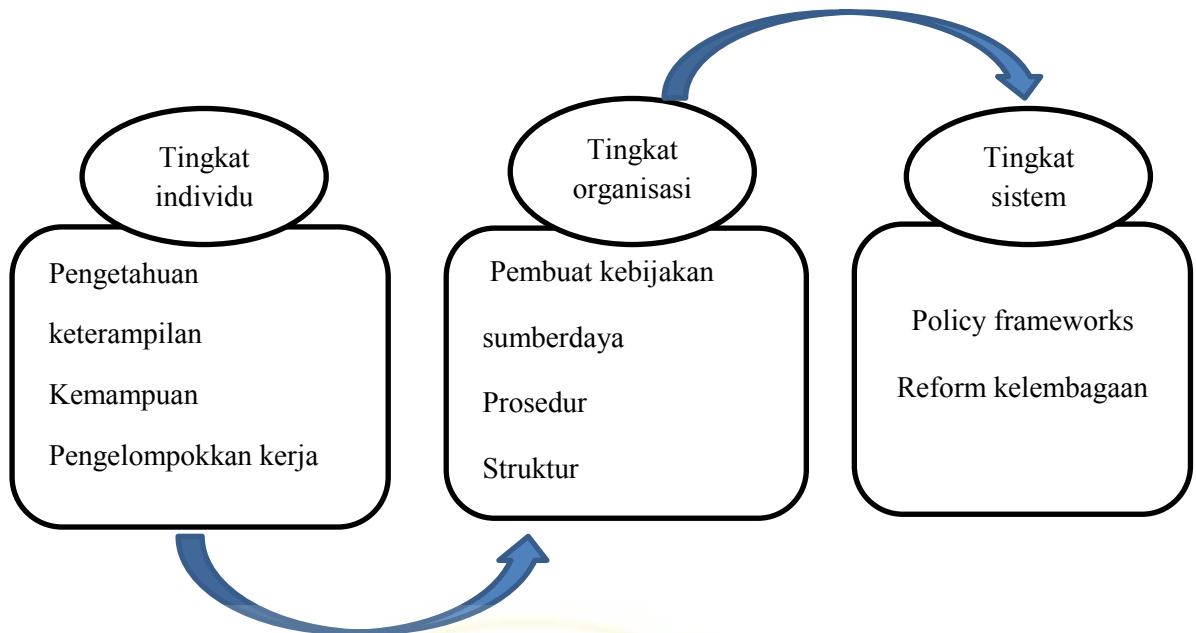
Dari pendapat di atas dapat di ketahui bahwa tingkatan dalam pengembangan kapasitas ada tiga level utama yaitu:

1. Tingkatan dan dimensi pengembangan kapasitas pada individu
2. Tingkatan dan dimensi pengembangan kapasitas pada organisasi
3. Tingkatan dan dimensi pengembangan kapasitas pada sistem.

Secara sederhana Selamat menggambarkan mengenai tingkatan dan dimensi pengembangan kapasitas yang terdiri dari level individu, organisasi dan sistem terlihat pada gambar berikut:

²⁷ Opcit Yeremias hal 8

²⁸ Opcit Yeremias hal 8



Gambar I.1
Tingkatan dalam Pengembangan Kapasitas.²⁹

Pengembangan kapasitas pada tingkatan individu yang meliputi aspek pembelajaran yang berguna untuk peningkatan kualitas diri dan peningkatan kemampuan diri sehingga memunculkan keterampilan- keterampilan dalam diri individu.

Pengembangan kapasitas pada level selanjutnya yakni pada level organisasi meliputi pembuatan kebijakan, sumberdaya, struktur serta prosedur yang nantinya akan berguna untuk memperkuat organisasi tersebut. selanjutnya pada level sistem yang merupakan lingkup tertinggi dalam pembahasan pengembangan kapasitas. Pada level sistem ini meliputi kerangka kerja dan juga reform kelembagaan.

Dari tingkatan pengembangan kapasitas diatas, pada penelitian ini di fokuskan pada pengembangan kapasitas pada individu. Dimana pada penelitian ini kapasitas individu dianggap sebagai komponen yang berpengaruh terhadap masalah-masalah yang menjerat masyarakat miskin.

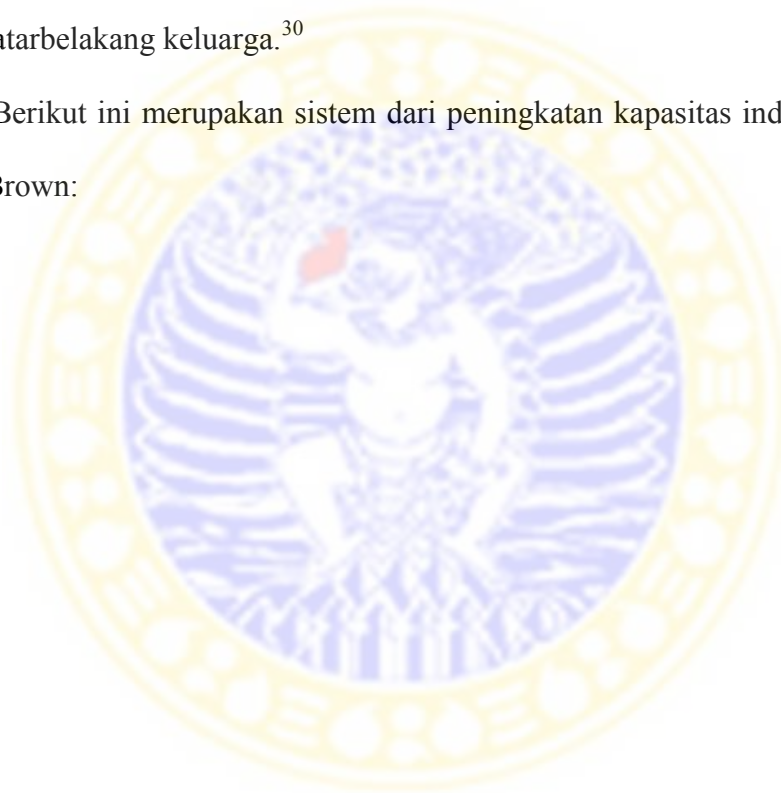
²⁹ Riyadi, Selamet. 2006. Banking Asset and Liability Management. Edisi ketiga. Jakarta: penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. hal 16

I.5.2.1.1 Pengembangan Kapasitas Individu

Pengembangan kapasitas pada dasarnya membantu individu untuk meningkatkan kemampuan dan pengetahuan diri sehingga terciptanya kualitas sumberdaya manusia yang berkualitas.

secara lebih spesifik Brown menjelaskan bahwa pengembangan kapasitas individu meliputi faktor pendidikan, pendapatan, pengetahuan, dan latarbelakang keluarga.³⁰

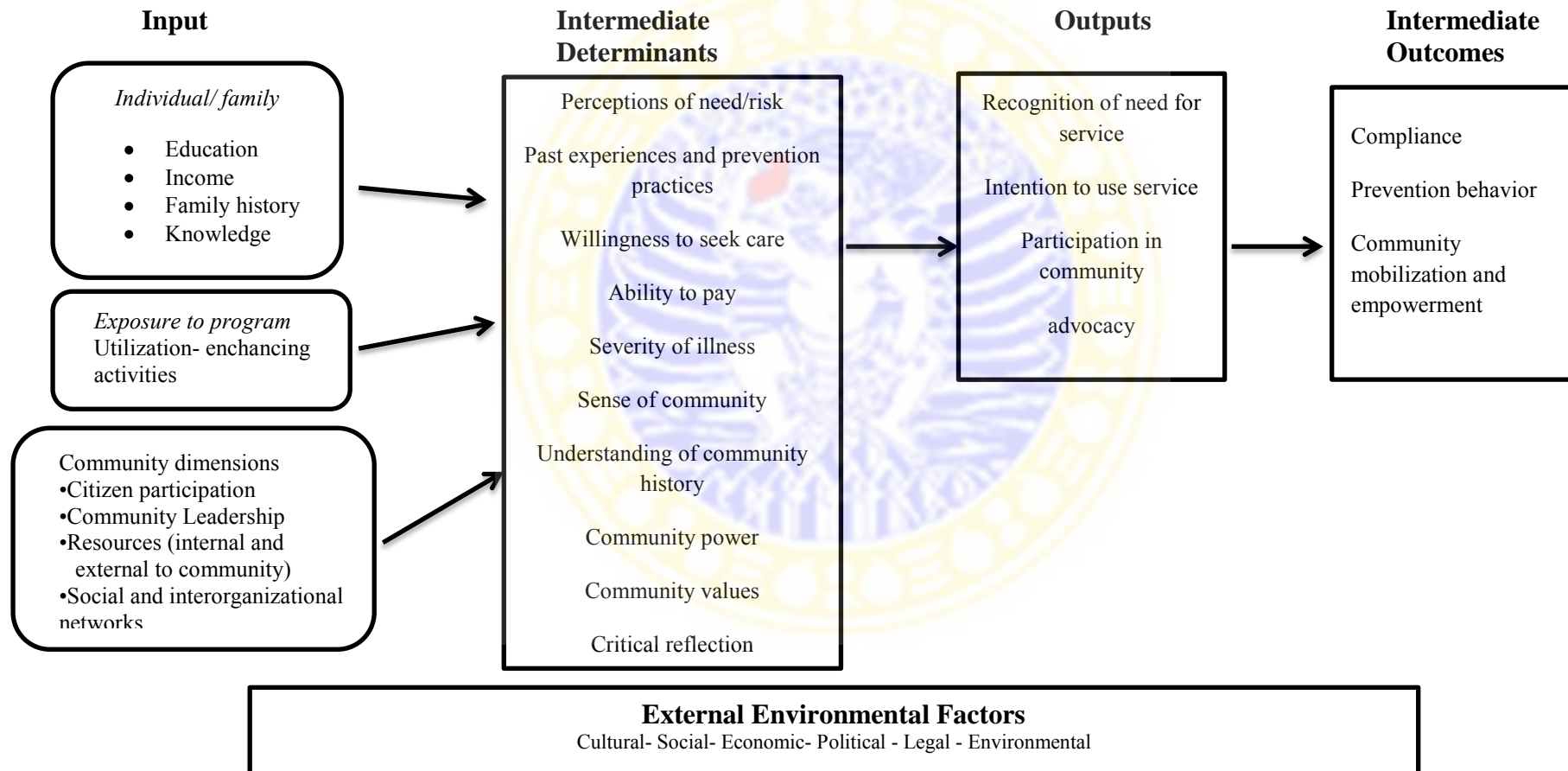
Berikut ini merupakan sistem dari peningkatan kapasitas individu menurut Brown:



³⁰ Brown, Lissane. 2001. Measuring Capacity Building. Carolina Population Center. University Of North Carolina at Chapel Hill. Hal 24

Gambar I.2

Individual/community Capacity



Pengembangan kapasitas pada individu dimaksudkan untuk menggali potensi-potensi yang ada dalam diri seseorang. Dengan pembelajaran yang terus menerus ini potensi-potensi yang terpendam dalam diri seseorang dapat di maksimalkan sehingga menjadikan seseorang tersebut menjadi sumberdaya yang berkualitas. Pada input individu diatas meliputi knowledge, income, education dan history family menjadi sebuah acuan bagaimana pengembangan kapastitas lebih di ditingkatkan lagi. Pada penelitian ini fokus pengembangan kapasitas di fokuskan pada kategory intermediate determinan karena dengan menggunakan indikator yang ada dalam kategory intermediate determinan dapat terjawab bagaimana peran UPKM dalam meningkatkan kapasitas anggota kelompok usaha bersama ini.

Dalam penelitian ini menggunakan indikator-indikator yang meliputi:

- Perceptions of need (penilaian kebutuhan)
- Ability to pay (kemampuan untuk membayar)
- Sense of community (rasa dalam berkelompok)
- Community power (kekuatan kelompok)
- Critical reflection (kemampuan untuk mengkritik)

Pemakaian indikator dalam penelitian ini hanya lima indikator tersebut di karenakan lima indikator yang lain yang tidak digunakan dalam penelitian ini dianggap peneliti tidak sesuai dengan konteks penelitian ini, yaitu past experiences and prevention practices, willingness to seek care, severity of illness, berkaitan dengan konteks kesehatan sehingga tidak cocok di terapkan pada konteks penelitian ini yang berhubungan dengan pemberdayaan masyarakat

miskin. Sedangkan *understanding of community history* dan *community value*, tidak di gunakan dalam penelitian ini dikarenakan kedua indikator tersebut tidak sesuai dengan objek penelitian yang akan diteliti sehingga bisa langsung di rangkap pada *community power*.

Dari kelima indikator yang digunakan dapat dilihat uraiannya sebagai berikut:

1.5.2.1.1 Penilaian Kebutuhan (Perception of need)

Penilaian kebutuhan adalah pandangan yang digunakan dalam melihat berbagai persoalan sebagai kebutuhan yang paling penting untuk diutamakan. Penilaian kebutuhan berarti mengidentifikasi kebutuhan yang dapat dijadikan prioritas untuk dikembangkan.

1.5.2.1.2 Kemampuan membayar (ability to pay)

Kemampuan membayar dapat diartikan bagaimana upaya yang dilakukan individu untuk memenuhi kewajibannya dalam membayar suatu jasa atau produk yang telah digunakannya.

1.5.2.1.3 Rasa dalam berkelompok (sense of community)

Rasa dalam berkelompok berarti rasa yang timbul dari setiap anggota kelompok untuk saling bersama dalam kelompok tersebut sehingga dapat memperkuat komitmen kelompok.

1.5.2.1.4 Kekuatan kelompok (community power)

Kekuatan kelompok berarti kemampuan setiap anggota kelompok dalam mengembangkan kelompoknya serta kemampuan kelompok dalam mempertahankan dari setiap gangguan yang muncul baik dari dalam kelompoknya maupun dari luar kelompok.

1.5.2.1.1.5 Kemampuan mengkritik (critical reflection)

Kemampuan individu dalam mengutarakan setiap pendapatnya kepada orang lain maupun mengutarakan pendapatnya di dalam sebuah forum.

1.5.3 Keterampilan

Pelatihan dilakukan sebagai tujuan dalam mengembangkan potensi yang ada di dalam diri seseorang. Pelatihan yang dilakukan secara terus-menerus sebagai proses belajar untuk meningkatkan kemampuannya dan mengembangkan skill maupun keterampilan dalam diri seseorang. Melalui proses belajar tersebut, seseorang dapat mengembangkan kapasitas yang ada di dalam dirinya. Melalui keterampilan belajar akan ditemukan suatu bentuk keterampilan khusus yang sesuai dengan bakat dan minatnya serta dapat digunakan sebagai basis untuk memperoleh penghasilan yang layak.³¹ Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, Keterampilan diartikan sebagai kecakapan dalam melaksanakan tugas. Menurut Tommy menjelaskan pengertian skill atau keterampilan yaitu:

“ Suatu skill atau keterampilan adalah suatu kemampuan untuk menerjemahkan pengetahuan ke dalam praktik sehingga tercapai hasil kerja yang di inginkan.”³²

Kemudian Harrow mendefinisikan keterampilan sebagai berikut:

“ keterampilan adalah keahlian dalam melakukan tugas dan sebagai suatu usaha ekonomis yang diperlihatkan seseorang pada saat melakukan gerakan-gerakan kompleks, dicerminkan dalam bentuk kecepatan, ketepatan, kekuatan dan kelancaran gerakan-gerakan tubuh.”³³

³¹ Anwar. 2004. Pendidikan kecakapan hidup (life skill education). Bandung. Alfabeta. Hal 12

³² Suprpto, Tommy. 2009. Pengantar Teori dan Manajemen Komunikasi. Edisi kedua. Yogyakarta: Medpress. Hal 135

³³ Harrow, J.A. 1970. Ataxonomy of the pscomotor domain. London: Logman Group LTD. Hal 75

Sedangkan menurut Budi Purwanto menyatakan bahwa:

“ Keterampilan adalah perilaku yang menunjukkan kemampuan individu dalam melakukan tugas mental atau fisik tertentu yang dapat di observasi.”³⁴

Sehingga dari pengertian-pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa keterampilan adalah kemampuan dari dalam diri yang di perlihatkan secara praktik untuk menghasilkan sesuatu yang diinginkan.

I.5.4 Produksi

Secara umum produksi diartikan sebagai suatu kegiatan atau proses yang menranspormasikan masukan (input) menjadi hasil keluaran (output). Dalam pemgertian yang bersifat umum ini penggunaannya cukup luas, sehingga mencakup keluaran (output) yang berupa barang atau jasa. Dalam arti sempit, pengertian produksi hanya dimaksud sebagai kegiatan yang menghsilkan barang baik barang jadi maupun barang setengah jadi, bahan industri dan suku cadang atau spareparts dan komponen. Hasil produksinya dapat berupa barang-barang konsumsi maupun barang-barang industri. Produksi adalah kegiatan untuk menciptakan atau menambah kegunaan suatu barang atau jasa.³⁵

Menurut sugiarto menjelaskan bahwa :

“Produksi adalah suatu kegiatan yang mengubah input menjadi output. Kegiatan tersebut dalam ekonomi biasa di nyatakan dalam fungsi produk, Fungsi produk menunjukkan jumlah maksimum output yang dapat dihasilkan dari pemakaian sejumlah input dengan menggunakan teknogi tertentu.”³⁶

³⁴ Purwanto, Budi. 2010 Manajemen SDM berbasis proses: pola pikir baru mengelola sdm pada era knowledge economy. Jakarta: grassindo. Hal 91

³⁵ Assauri, Sofyan. 1999. Manajemen Produksi dan Operasi, Edisi Revisi, LPFEUI. Jakarta. Hal 11

³⁶ Nova Tumoka. 2013. Analisis Pendapatan Usaha Tani Tomat di Kecamatan Kawangkoan Barat Kabupaten Minahasa. Jurnal EMBA Vol.1 No.3. Hal. 346 diakses 29 november 2014 pukul 12:04

Sedangkan pengertian produksi menurut Sudarman yaitu:

“Produksi sering didefinisikan sebagai penciptaan guna, dimana guna berarti kemampuan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan manusia.”³⁷

Pengertian lain yang di ungkapkan oleh Partadireja yaitu:

“Produksi adalah segala kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan atau menambah guna atas suatu benda, atau segala kegiatan yang ditujukan untuk memuaskan orang lain melalui pertukaran.”³⁸

Menurut Murti Sumarti dan Jhon Soeprihanto memberikan pengertian produksi sebagai berikut :

“Produksi adalah semua kegiatan dalam menciptakan atau menambah kegunaan barang atau jasa, dimana untuk kegiatan tersebut diperlukan faktor-faktor produksi.”³⁹

Sehingga dari pengertian-pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa produksi adalah semua kegiatan yang menghasilkan barang atau jasa untuk memuaskan oranglain.

³⁷ Ibid nova tumoka, hal 346

³⁸ Partadireja, Ace. 1985. Pengantar Ekonomi. Yogyakarta: BPFE-UGM. Hal 21

³⁹ Sumiarti, Murti et, al. 1987. Dasar-dasar Ekonomi Perusahaan. Edisi II. Yogyakarta: Penerbit Liberty. Hal 60

I.6 Definisi Konsep

- Peran adalah pola perilaku yang di miliki oleh kelompok yang mempunyai batasan dalam memberikan sebuah keputusan sehingga apa yang di lakukan dan tidak dilakukan dapat berpengaruh.
- Unit Pembina Keluarga Miskin (UPKM) adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat kelurahan melalui musyawarah pemangku kepentingan untuk melaksanakan tugas pembinaan dan pendampingan masyarakat miskin pada program Rehabilitasi Sosial Daerah Kumuh
- Peran Unit Pembina Keluarga Miskin (UPKM) adalah lembaga lokal yang dibentuk dalam program pemberdayaan yang berfungsi sebagai fasilitator sehingga apa yang di lakukan dan tidak dilakukan oleh lembaga lokal tersebut berpengaruh terhadap setiap proses kegiatan yang ada.
- Kapasitas adalah kemampuan, skill dan keterampilan yang dimiliki individu dalam melaksanakan fungsinya untuk mencapai tujuannya.
- Pengembangan kapasitas adalah suatu proses belajar secara terus menerus oleh individu untuk meningkatkan pengetahuan maupun keterampilan.
- Keterampilan adalah kemampuan dari dalam diri yang di perhatikan secara praktik untuk menghasilkan sesuatu yang diinginkan.
- Produksi semua kegiatan yang menghasilkan barang atau jasa untuk memuaskan oranglain.
- Anggota kelompok usaha bersama adalah kelompok yang dibentuk di dalam masyarakat yang melakukan kegiatan bersama berdasarkan minat dan bakat yang dimiliki individu.

- Pengembangan kapasitas keterampilan produksi anggota kelompok usaha bersama adalah proses belajar kelompok usaha bersama melalui pelatihan yang di berikan berdasarkan minat dan bakat sehingga meningkat pula pengetahuan serta keterampilan yang dimiliki setiap individu.

1.7 Rincian Data yang Ditemukan

Untuk memudahkan peneliti menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini dibutuhkan beberapa data yang dijadikan pedoman untuk mendukung mendukung kelengkapan data serta informasi terkait, yang didapatkan selama proses penelitian dilapangan.

1. Data primer yaitu data yang didapat secara langsung melalui wawancara, data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah:
 - a. Bagaimana peran UPKM sebagai fasilitator dalam meningkatkan kapasitas keterampilan produksi anggota kelompok usaha bersama yang meliputi: penilaian kebutuhan, kemampuan membayar, rasa dalam berkelompok, kekuatan kelompok dan kekuatan kelompok.
 - b. Bagaimana peran UPKM sebagai motivator dalam meningkatkan kapasitas keterampilan produksi anggota kelompok usaha bersama yang meliputi: penilaian kebutuhan, kemampuan membayar, rasa dalam berkelompok, kekuatan kelompok dan kekuatan kelompok.
 - c. Bagaimana peran UPKM sebagai penghubung dalam meningkatkan kapasitas keterampilan produksi anggota kelompok usaha bersama yang meliputi: penilaian kebutuhan, kemampuan membayar, rasa dalam berkelompok, kekuatan kelompok dan kekuatan kelompok.

2. Data Sekunder yaitu yang berasal dari dokumen - dokumen yang meliputi Laporan tahunan pelaksanaan program Rehabilitasi Sosial Daerah Kumuh (RSDK) dan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 33 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Program Rehabilitasi Sosial Daerah Kumuh Kota Surabaya.(Lampiran)

I.8 Metode Penelitian

Di setiap penelitian, diperlukan metode untuk menjawab pertanyaan dalam penelitian. Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.⁴⁰ Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dll, secara holistik (utuh) dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah.⁴¹

Alasan peneliti untuk menggunakan metode penelitian kualitatif adalah dilihat dari sifat masalah yang diteliti, dimana dalam penelitian ini, peneliti ingin menggambarkan bagaimana peran Unit Pembina Keluarga Miskin (UPKM) dalam meningkatkan kapasitas anggota kelompok usaha bersama pada Program Rehabilitasi Sosial Daerah Kumuh (RSDK) sehingga peneliti disini menggunakan

⁴⁰ Sugiyono. 2008. Metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan R & D. Bandung: CV. Alfabeta. Hal 2

⁴¹ Molleong, J. Lexy. 2008. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya Offset. Hal 6

metode penelitian kualitatif sebagai metode yang tepat untuk menggambarkan tujuan penelitian ini.

I.8.1 Tipe Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian, Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif. penelitian deskriptif bertujuan untuk menggambarkan dan menjelaskan fenomena yang terjadi di lapangan. Dalam penelitian ini di maksudkan untuk menggambarkan bagaimana peran UPKM dalam meningkatkan kapasitas anggota kelompok usaha bersama dalam program Rehabilitasi Sosial Daerah Kumuh(RSDK) di Kleuran Plosi Kota Surabaya.

I.8.2 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian mengenai peran Unit Pembina Keluarga Miskin (UPKM) yang merupakan bagian dari program Rehabilitasi Sosial Daerah Kumuh (RSDK) mengambil lokasi di Kelurahan Ploso Kecamatan Tambaksari Kota Surabaya. pertimbangan yang diambil oleh peneliti dalam pemeliharaan lokasi adalah sebagai berikut:

- Kelurahan Ploso merupakan kelurahan yang masuk wilayah Kecamatan Tambaksari dengan tingkat kepadatan penduduk tertinggi di kota Surabaya.
- Kecamatan tambaksari dari tahun 2010 hingga tahun 2013 merupakan wilayah paling banyak menjadi sasaran program RSDK yaitu sekitar delapan kelurahan. Dari kedelean kelurahan tersebut hanya Kelurahan

Ploso merupakan kelurahan yang tersentuh program RSDK dua kali berturut-turut pada tahun 2012 dan 2013.

I.8.3 Teknik Penentuan Informan

Penelitian ini menggunakan purposive sampling sebagai teknik penentuan informan yang dianggap memiliki wawasan dan pengetahuan yang mumpuni di bidang fokus penelitian ini.

Informan dalam penelitian ini adalah:

- a. Dinas Sosial Kota Surabaya meliputi :
 - Kepala Sub Bidang Rehabilitasi Sosial Daerah Kumuh yaitu Bapak Agus Sumitro, S. sos
- b. Unit Pembina Keluarga Miskin Kelurahan Ploso meliputi:
 - Ketua UPKM yaitu Bapak Heru Pusoko, S. pd
 - Bendahara UPKM Ibu Winartini
 - Sekretaris UPKM Bapak Agus Haryanto Hidayat
- c. Masyarakat miskin sasaran program RSDK Kelurahan Ploso meliputi:
 - Anggota kelompok usaha bersama bidang tata boga tahun 2012 Ibu Mursini
 - Anggota kelompok usaha bersama bidang tata boga tahun 2012 Ibu Suti'ah
 - Anggota kelompok usaha bersama bidang tata boga tahun 2013 Ibu Sutri
 - Anggota kelompok usaha bersama bidang tata boga tahun 2013 Ibu Sholihah
 - Anggota kelompok usaha bersama bidang tata boga tahun 2013 Ibu Koestono

I.8.4 Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini cara untuk mendapatkan data dilakukan melalui:

1. Metode Observasi

Metode ini menggunakan pengamatan langsung dilapangan untuk memperoleh keabsahan data, apakah data yang kita peroleh benar-benar akurat apa tidak. Metode ini telah dilakukan di Dinas Sosial Kota Surabaya selaku pembuat kebijakan/program RSDK dan UPKM Kelurahan Ploso Kecamatan Tambaksari Kota Surabaya.

2. Metode Wawancara mendalam

Teknik wawancara mendalam adalah teknik yang menggunakan percakapan secara mendalam guna memperoleh informasi sebanyak-banyaknya dari yang peneliti wawancarai mengenai permasalahan dan fokus penelitian.

Kepala Wawancara mendalam dilakukan melalui unsur-unsur, yaitu:

1. Dinas Sosial Kota Surabaya, yang terdiri dari:

- Kepala Sub Bidang Rehabilitasi Sosial Daerah Kumuh yaitu Bapak Agus Sumitro, S. sos

2. Unit Pembina Keluarga Miskin Kelurahan Ploso meliputi:

- Ketua UPKM yaitu Bapak Heru Pusoko, S. pd
- Bendahara UPKM yaitu Ibu Winartini
- Sekretaris UPKM yaitu Bapak Agus Haryanto Hidayat

3. Masyarakat miskin sasaran program RSDK Kelurahan Ploso meliputi:

- Anggota kelompok usaha bersama bidang tata boga tahun 2012
Ibu Mursini
- Anggota kelompok usaha bersama bidang tata boga tahun 2012 Ibu
Suti'ah
- Anggota kelompok usaha bersama bidang tata boga tahun 2013 Ibu
Sutri
- Anggota kelompok usaha bersama bidang tata boga tahun 2013 Ibu
Sholihah
- Anggota kelompok usaha bersama bidang tata boga tahun 2013 Ibu
Koestono

3. Metode Dokumentasi (pemanfaatan Data Sekunder)

Menurut Guba dan Lincoln dokumen adalah setiap bahan tertulis ataupun film yang tidak dipersiapkan karena adanya permintaan seorang penyidik.⁴²

Dokumen ini seperti contoh: surat, memorandum, pengumuman resmi, agenda, kesimpulan pertemuan, laporan peristiwa, dokumen administratif (proposal, laporan kemajuan dan dokumentasi lainnya), penelitian-penelitian, hasil evaluasi, artikel- artikel di media online maupun media masa, tabel-table dan sumber-sumber data tertulis lainnya yang diperlukan dalam penelitian ini. dalam penelitian ini, data dokumentasi berupa data statistik, data tentang LPJ Program RSDK, Panduan umum pelaksanaan program RSDK, foto-foto terkait pelaksanaan Program RSDK.

⁴² Moleong, Lexy J. 1988. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: PT Remaja Rosdakarya. Hal 161

I.8.5 Teknik Analisis Data

Analisis Data Kualitatif menurut Bogdan dan Biklen adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang di pelajari dan memutuskan apa yang dapat di ceritakan kepada orang lain.⁴³

Menurut Seiddel, analisis data kualitatif prosesnya adalah sebagai berikut⁴⁴:

- Mencatat yang menghasilkan catatan lapangan, dengan hal itu diberi kode agar sumber datanya tetap dapat ditelusuri
- Mengumpulkan, memilah-milah, mengklasifikasikan, mensintesiskan, membuat ikhtisar dan membuat indeksnya.
- Berpikir, dengan jalan membuat agar kategori data itu mempunyai makna, mencari dan menemukan pola dan hubungan-hubungan, dan membuat temuan-temuan umum.

Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah dengan cara menggunakan tiga alur kegiatan yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman yaitu teknik triangulasi terdiri dari tiga tahap yaitu reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan.⁴⁵

⁴³ Moleong, Lexy J. 2007. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: PT Remaja Rosdakarya. Hal 284

⁴⁴ Ibid hal 284

⁴⁵ Miles, Matthew. B. Huberman, dan A. Michael.(eds). 2009. Analisis Data Kualitatif. Jakarta: Universitas Indonesia Press 20

a. Reduksi Data

Reduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya.⁴⁶ Proses reduksi data dilakukan dengan memilah-milah data yang didapat dari berbagai sumber.

b. Penyajian Data

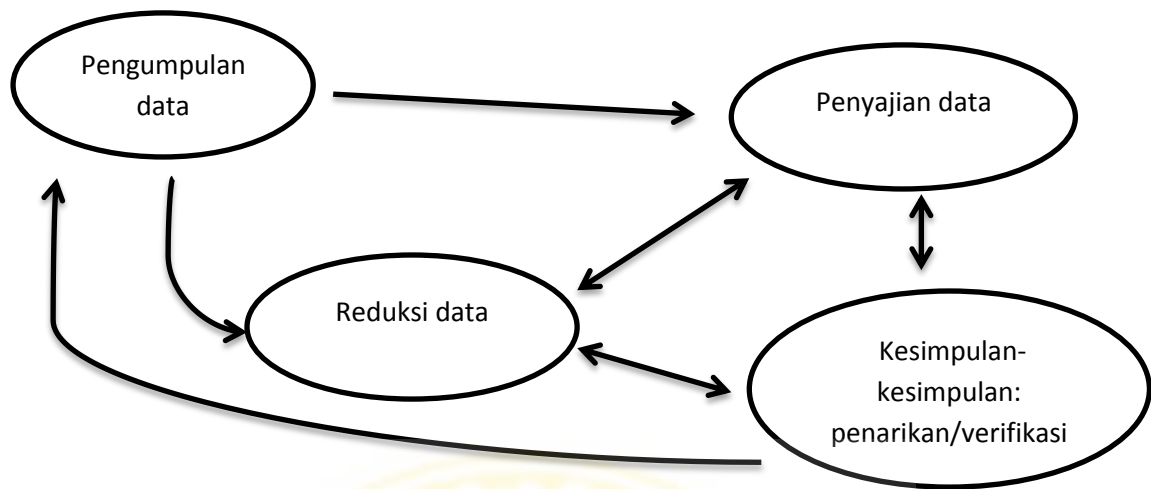
Alur kedua yang terpenting dalam teknik analisis data adalah penyajian data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart, dan sejenisnya.⁴⁷ Dengan penyajian data ini, maka akan mudah untuk memahami apa yang sedang terjadi dan merencanakan kegiatan selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami.

c. Penarikan Kesimpulan

Tahapan analisis ketiga yang penting adalah menarik kesimpulan dan verifikasi. Miles dan huberman memandang penarikan kesimpulan hanyalah sebagian dari satu kegiatan dari konfigurasi yang utuh. Kesimpulan-kesimpulan juga diverifikasi selama penelitian berlangsung.

⁴⁶ Opcit Sugiono hal 247

⁴⁷ Opcit sugiono hal 249



Gambar I.3

Komponen-Komponen Analisis Data: Model interaktif.⁴⁸

I.8.6 Teknik Pemeriksaan dan Keabsahan Data

Untuk menetapkan keabsahan data (*trustworthiness*) data di perlukan teknik pemeriksaan. Moleong menjelaskan ada empat kriteria yang digunakan yaitu, derajat kepercayaan (*credibility*), keteralihan (*transferability*), kebergantungan (*dependability*), dan kepastian (*confirmability*).⁴⁹

Penerapan kriterium derajat kepercayaan (kredibilitas) pada dasarnya menggantikan konsep validitas internal dari nonkualitatif. Kreterium ini berfungsi: pertama, melaksanakan inkuiri sedemikian rupa sehingga tingkat kepercayaan penemuannya dapat dicapai; kedua, mempertunjukkan derajat kepercayaan hasil-hasil penemuan dengan jalan pembuktian oleh peneliti pada kenyataan ganda yang sedang diteliti.

Kreterium keteralihan berbeda dengan validitas eksternal dari nonkualitatif. Konsep validitas itu menyatakan bahwa generalisasi suatu penemuan dapat

⁴⁸ Opcit miles hal 20

⁴⁹ Opcit moleong hal 324

berlaku atau diterapkan pada semua konteks dalam populasi yang sama atas dasar penemuan yang diperoleh pada sampel secara representatif mewakili populasi itu. Keteralihan sebagai persoalan empiris tergantung pada kesamaan antara konteks pengirim dan penerima.

Kriterium kebergantungan merupakan substitusi istilah reliabilitas dalam penelitian yang nonkualitatif. Konsep kebergantungan lebih luas daripada reliabilitas. Hal tersebut disebabkan oleh peninjauannya dari segi bahwa konsep itu memperhitungkan segala-galanya.

Kriterium kepastian berasal dari konsep objektivitas menurut nonkualitatif. Nonkualitatif menetapkan objektivitas dari segi kesepakatan antarsubjek. Di sini pemastian bahwa sesuatu itu objektif atau tidak bergantung pada persetujuan beberapa orang terhadap pandangan, dan penemuan seseorang.

Kemudian, keempat unsur tersebut diuji keabsahannya menggunakan teknik pemeriksaan keabsahan data yakni triangulasi data. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain. Triangulasi menurut Denzin membedakan empat macam triangulasi sebagai teknik pemeriksaan yang memanfaatkan penggunaan sumber, metode, penyidik, dan teori.⁵⁰

Pada penelitian ini, peneliti memilih teknik triangulasi dengan memanfaatkan sumber data, dimana membandingkan dan mengecek kembali derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda. Teknik ini dilakukan dengan cara peneliti mengumpulkan data dari

⁵⁰ Opcit moleong hal 330

berbagai sumber yang berbeda mengenai permasalahan yang dikaji untuk kemudian dibandingkan. Triangulasi sumber data dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1. Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara.
2. Membandingkan hasil wawancara dengan isi dokumen yang berkaitan.





